



Masuk Angkringan Wajib Scan QR Code

■ Pemkot Tunggu Juknis Distribusi Moderna
Bagi Warga Belum Vaksin

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah DIY akan memperluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat wajib untuk bepergian maupun berkunjung ke tempat-tempat umum. Setelah diujicobakan di mal, penggunaannya akan diperluas mulai dari objek wisata, restoran, sekolah, warung makan, maupun angkringan.

"Kami sudah melakukan di mal dan di tempat wisata sedang kita siapkan. Bahkan, nanti sampai warung-warung angkringan akan kita berlakukan," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Minggu (5/9).

Aji menjelaskan, aplikasi tersebut difungsikan sebagai alat skrining untuk memastikan masyarakat yang bepergian telah divaksin setidaknya dosis pertama. Hal ini dibuktikan dengan cara memindai kode pada sertifikat vaksinasi lewat aplikasi PeduliLindungi.

"Jadi PeduliLindungi saya kira keputusan pemerintah akan jadi satu-satunya paspor untuk masuk ke lokasi berkerumun. Hal ini karena di sana akan ada informasi vaksin berapa kali, orang itu positif atau tidak, semua laboratorium yang melakukan PCR harus menginput data ke PeduliLindungi," jelasnya.

Saat ini pihaknya masih menunggu pengiriman QR code aplikasi PeduliLindungi dari pemerintah pusat. QR code tersebut nantinya akan disebar di tempat-tempat-

PUTUS PENYEBARAN VIRUS

- Pemerintah DIY akan memperluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- Nantinya, menjadi syarat wajib untuk bepergian maupun berkunjung ke tempat-tempat umum.
- Pemkot Yogya telah menerima 22 dosis ribu Moderna.
- Saat ini pendistribusian vaksin menunggu juknis dari pemerintah.

mun.

"Walaupun destinasi wisata belum buka kita telah minta Dinas Pariwisata bicara ke Kemenkes supaya bisa dikeluarkan QR code untuk masing-masing (destinasi wisata). Karena tiap tempat QR codenya beda. Jadi itu ada titik koordinatnya," jelasnya.

Aplikasi tersebut, lanjut Aji, juga dapat mempermudah instansi pemerintah untuk melakukan tracing kontak kasus positif jika ditemui penularan Covid-19. Sebab, riwayat perjalanan masyarakat akan terekam aplikasi PeduliLindungi saat penggunaannya melakukan pemindaian QR code di suatu lokasi.

"Supaya kalau kita scan dan hasilnya merah, itu orang yang datang di tempat dan koordinat yang sama akan diketahui bahwa anda baru saja ketemu orang yang merah (positif Covid-19)," lanjutnya.

Aji melanjutkan, untuk pendataan para penerima QR code di DI Yogyakarta akan dilakukan dengan melibatkan asosiasi dan perhimpunan yang ada di DI Yogyakarta.

"Yang mendata dari komunitas masing-masing, PHRI, Asita, GPI, dan asosiasi mal itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, KGPAA Paku Alam X meminta kepada pemerintah pusat untuk menjamin keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Sebab, data-data sensitif masyarakat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terhimpun melalui aplikasi tersebut.

Sri Paduka juga berharap agar kecepatan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat ditingkatkan, utamanya di ruang-ruang publik agar tidak terjadi jeda yang terlalu lama saat digunakan. Sebab hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan antrean kerumunan.

Menyuntikkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal mengalokasikan vaksin Covid-19 jenis Moderna untuk warga masyarakat yang belum terimunisasi. Namun, terkait pelaksanaannya, masih menunggu arahan Pemda DIY.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, berujar, pihaknya telah menerima 22 dosis ribu Moderna. Karena itu, yang terjajah nanti, bukan sebatas tenaga medis saja.

Sekadar informasi, sebelumnya, Moderna memang hanya dikhususkan bagi tenaga medis untuk booster, atau dosis ke tiga vaksin. Akan tetapi, kebijakan itu lantas bergeser. "Jadi, vaksinya (Moderna) sudah ada dan masih disimpan. Nanti itu kita tujuikan juga pada warga yang belum divaksin, selain dosis ke tiga nakes," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu juknis pendistribusian vaksin Moderna bagi penduduk, atau non nakes. (tre/aka)

- ☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Kepala

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005